

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Konflik Nagorno-Karabakh merupakan warisan dari Uni Soviet. Aktor utama yang terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah Armenia dan Azerbaijan. Baru-baru ini konflik Nagorno-Karabakh kembali pecah pada 27 September 2020 (Modebadze, 2021:103). Konflik ini pecah akibat Armenia dan Azerbaijan sama-sama saling menuduh memulai penyerangan. Secara spesifik, pihak Armenia menuduh bahwa pasukan Azerbaijan menyerang militer Armenia di Kota Vardenis, Armenia, sebaliknya Kementerian Pertahanan Azerbaijan menuding bahwa pasukan Armenia yang terlebih dahulu menyerang Kota Dashkasan, Azerbaijan (Lisbet, 2020:7). Adanya penyerangan ini mendorong Pemerintah Armenia menerapkan darurat militer dan mengerahkan kekuatan militer secara total, sedangkan Pemerintah Azerbaijan melakukan operasi kontra-ofensif berskala besar (Aljazeera, 2020). Seiring berjalannya waktu, penyerangan ini bereskalasi menjadi pertempuran yang lebih parah dari rentetan konflik Nagorno-Karabakh sebelumnya. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak menggunakan seluruh kekuatannya, seperti artileri berat, *drone* militer, helikopter, pesawat tempur, dan tank (Martin Russell, 2020). Pada 22 Oktober 2020, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa hampir sebanyak 5.000 korban jiwa tewas akibat penggunaan militer yang masif dalam konflik Nagorno-Karabakh (BBC,

2020c). Konflik Nagorno-Karabakh (2020) menjadi momentum bagi para aktor internasional untuk terlibat dalam mendukung atau menyelesaikan konflik tersebut. Oleh karena itu, konflik Nagorno-Karabakh mengundang perhatian para aktor internasional.

Salah satu aktor internasional yang terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh yang pecah pada 27 September 2020 adalah Turki. Pada 27 September 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan secara terbuka langsung mendukung operasi militer Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh (Independent, 2020). Selain itu, Presiden Erdoğan juga menyerukan seluruh dunia internasional agar mendukung Azerbaijan dalam konflik tersebut (VOA, 2020). Dukungan yang diberikan oleh Presiden Erdoğan kepada Azerbaijan terlihat hanya secara politik, tetapi kenyataannya di lapangan justru alutsista militer Turki dikerahkan guna menghancurkan pihak lawan, yaitu Armenia. Pada 29 September 2020, Kementerian Pertahanan Armenia mengklaim bahwa pesawat tempurnya, yaitu Su-25 ditembak jatuh oleh pesawat F-16 milik Turki di wilayah udara Armenia (TASS, 2020b). Namun, Juru Bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin dan Menteri Pertahanan Azerbaijan Kolonel Jenderal Zakir Hasanov membantah hal tersebut (TASS, 2020b). Adanya dukungan Turki kepada Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh semakin meningkatkan tensi ketegangan konflik tersebut. Sementara itu, tuduhan yang dilayangkan oleh Armenia kepada Azerbaijan dan Turki membuat hubungannya dengan kedua negara ini menjadi buruk. Singkat kata, Presiden Erdoğan membawa Turki sebagai aktor

internasional yang mendukung Azerbaijan secara politik dalam konflik Nagorno-Karabakh.

Aktor internasional lainnya yang terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh ialah Rusia. Rusia terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh sebagai pihak mediator. Rusia memainkan perannya sebagai pihak mediator ketika Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov berhasil melakukan mediasi bersama Armenia dan Azerbaijan pada 10 Oktober 2020 (DW, 2020). Namun, kesepakatan gencatan senjata yang disetujui di dalam proses mediasi berujung pada kegagalan akibat serangan yang dilakukan oleh Azerbaijan di kota Stepanakert (DW, 2020). Seiring berjalannya waktu, proses mediasi antara Armenia dan Azerbaijan terkait konflik Nagorno-Karabakh ditengahi secara langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Proses mediasi ini dilakukan melalui konferensi video yang dihadiri oleh Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan Presiden Putin. Proses mediasi ini berhasil dengan ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia pada 9 November 2020 (President of Russia, 2020b). Perjanjian ini berisi ketentuan-ketentuan tertentu yang mulai berlaku pada 10 November 2020 (President of Russia, 2020b). Akan tetapi, perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia tidak masuk ke dalam kerangka OSCE Minsk Group. Dengan demikian, perjanjian gencatan senjata yang disepakati oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia secara efektif dapat menghentikan konflik Nagorno-Karabakh.

Berakhirnya konflik Nagorno-Karabakh mendorong Turki dan Rusia melakukan sebuah kesepakatan. Pada 11 November 2020, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melalui konferensi video menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) guna membangun Pusat Gabungan Turki-Rusia di Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2020a). Pusat Gabungan Turki-Rusia digunakan untuk mengawasi perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia pada 9 November 2020 (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2020b). Bangunan Pusat Gabungan Turki-Rusia didirikan di wilayah Ağdam, Azerbaijan dan diresmikan pada 30 Januari 2021 (Ministry of Defence of The Republic of Azerbaijan, 2021). Peresmian ini dihadiri oleh Menteri Pertahanan Azerbaijan Zakir Hasanov, Wakil Menteri Pertahanan Turki Yunus Emre Karaosmanoğlu, dan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin bersama 60 tentara Turki dan 60 tentara Rusia (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2021a). Adanya Pusat Gabungan Turki-Rusia menjadi salah satu kerja sama strategis yang dapat memperkuat hubungan kedua negara tersebut. Terlebih lagi, kerentanan konflik Nagorno-Karabakh akan pecah kembali dapat diminimalisir melalui adanya pusat pengamatan tersebut. Alhasil, Pusat Gabungan Turki-Rusia menjadi salah satu proses perdamaian yang dilakukan oleh Turki dan Rusia pasca konflik Nagorno-Karabakh.

Keterlibatan Turki di Pusat Gabungan Turki-Rusia dalam isu konflik Nagorno-Karabakh memiliki urgensi yang perlu dikaji. Dalam hal ini, sejak tahun 1992 hingga konflik Nagorno-Karabakh pecah pada 27 September 2020, Turki hanya terlibat sebagai pihak yang mendukung Azerbaijan. Namun, Turki justru terlibat dalam upaya proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh pasca perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia pada 9 November 2020. Upaya proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh ini dapat dilihat dari keterlibatan Turki bersama Rusia di dalam Pusat Gabungan Turki-Rusia. Keterlibatan Turki bersama Rusia di dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh melalui Pusat Gabungan Turki-Rusia inilah yang menjadi fenomena *gap* yang harus dicari tahu kebenaran ilmiahnya. Lebih dari itu, keberadaan Pusat Gabungan Turki-Rusia ini juga memiliki urgensi, yaitu mengawasi perjanjian gencatan 9 November 2020 agar konflik atau kontak senjata antara Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh bisa diminimalisir, sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari kedua belah pihak tersebut dan pembicaraan tingkat tinggi terkait pengakuan wilayah Nagorno-Karabakh bisa dirundingkan dengan baik oleh Armenia dan Azerbaijan. Oleh karena itu, adanya urgensi ini, maka penelitian ini memberikan novelty (kebaruan).

Penelitian ini memiliki *novelty* (kebaruan) berdasarkan pada latar belakang yang telah disajikan. Penelitian ini terlebih dahulu akan disandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya guna melihat perbedaan yang jelas. Dimulai dari penelitian yang dibuat oleh Bayram Balci dengan

judul “Strengths and Constraints of Turkish Policy in the South Caucasus” (2014) yang memaparkan bahwa Turki mulai menaruh perhatiannya terhadap wilayah Armenia, Azerbaijan, dan Georgia pasca bubarnya Uni Soviet (Balci, 2014). Dalam hal ini, Armenia, Azerbaijan, dan Georgia memiliki pasokan energi yang melimpah. Adanya pasokan energi yang melimpah ini mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki. Turki memiliki ketergantungan terhadap pasokan energi, sehingga Turki selalu berusaha agar memiliki koneksi yang baik dengan Armenia, Azerbaijan, dan Georgia. Berkaitan dengan konflik Nagorno-Karabakh, Turki selalu berupaya agar hubungannya dengan Armenia dapat terjalin dengan baik. Namun, upaya ini tidak bisa dilakukan karena Turki memiliki kemitraan dengan Azerbaijan dalam hal sekutu dan mitra ekonomi. Adanya kemitraan ini Turki selalu mengandalkan Azerbaijan dan sebaliknya juga seperti itu. Penting untuk digarisbawahi bahwa persamaan penelitian karya Bayram Balci dengan penelitian ini ialah kebijakan luar negeri Turki yang selalu pro terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Sebaliknya, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan karya Bayram Balci yang terletak pada kemitraan strategis Turki dan Rusia dalam membangun Pusat Gabungan Turki-Rusia pasca konflik Nagorno-Karabakh.

Berikutnya, ada penelitian yang berjudul “The Discourse One Nation Two States: The Position of Turkey in The Nagorno-Karabakh Conflict” (2015) yang ditulis oleh Shamkal Abilov dengan penjelasan bahwa Turki memiliki kebijakan luar negeri yang kooperatif terhadap Azerbaijan dalam

konflik Nagorno-Karabakh (Abilov, 2015). Dalam hal ini, Turki mempertahankan posisinya sebagai aktor internasional yang mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Turki mulai memosisikan dirinya sebagai pendukung Azerbaijan bermula ketika pasukan militer Armenia melakukan pembantaian penduduk sipil di Kota Khojaly pada 26 Februari 1992. Dukungan yang diberikan oleh Turki memiliki tujuan supaya Azerbaijan dapat menjaga keutuhan wilayah Nagorno-Karabakh dari pasukan militer Armenia. Pasca peristiwa ini hubungan Turki dan Azerbaijan semakin direkatkan dengan prinsip *one nation, two states*. Adanya prinsip ini mendorong Turki berusaha menarik perhatian lembaga internasional dan regional guna mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Penting untuk digarisbawahi bahwa persamaan penelitian yang ditulis oleh Shamkal Abilov dengan penelitian ini adalah alasan Turki mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Namun, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Shamkal Abilov, yaitu alasan Turki melakukan kesepakatan kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia pasca konflik Nagorno-Karabakh.

Kemudian, penelitian yang dibuat oleh Lisbet yang berjudul “The Armenian-Azerbaijan Conflict and International Communities Peace Efforts” (2020) yang memaparkan latar belakang konflik Nagorno-Karabakh, implikasi campur tangan Turki dan Rusia terhadap konflik Nagorno-Karabakh, dan usaha masyarakat internasional untuk mendamaikan konflik tersebut (Lisbet, 2020). Dalam hal ini, penelitian yang dibuat oleh Lisbet mengungkapkan

bahwa latar belakang terjadinya konflik Nagorno-Karabakh disebabkan oleh bubarnya Uni Soviet. Lebih dari itu, keterlibatan Turki dan Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh yang pecah tahun 2020 dikhawatirkan akan merusak pipa saluran minyak dan gas dunia yang ada di sekitar wilayah Nagorno-Karabakh. Disisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai masyarakat internasional telah mendorong pemimpin Armenia dan Azerbaijan untuk terlibat dalam proses negosiasi guna menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh. Adanya latar belakang konflik Nagorno-Karabakh yang rumit, implikasi campur tangan Turki dan Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh, dan usaha masyarakat internasional tidak membuahkan hasil pada penyelesaian yang komprehensif atas konflik Nagorno-Karabakh. Penting untuk digarisbawahi bahwa penelitian karya Lisbet dengan penelitian ini adalah keterlibatan Turki dan Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh. Sebaliknya, penelitian ini memiliki perbedaan dengan karya Lisbet yang terletak pada keterlibatan Turki dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh bersama Rusia.

Terakhir, ada penelitian yang berjudul “Turkey’s Approach to The Nagorno-Karabakh Crisis (2003-2020)” (2020) karya Zeynab Vatankah yang menjelaskan pendekatan Turki terhadap krisis Nagorno-Karabakh di bawah pemerintahan Partai AKP (*Adalet ve Kalkynma Partisi*) sejak tahun 2003-2020 (Vatankah, 2021). Dalam hal ini, Turki yang dipimpin oleh Partai AKP (*Adalet ve Kalkynma Partisi*) mendorong negara ini menjadi aktor yang lebih



aktif di kancah internasional. Adanya kepemimpinan ini mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki yang mulai bergeser dari Barat ke wilayah Afrika, Kaukasus Selatan, dan Timur Tengah guna meningkatkan hubungannya kepada negara-negara yang ada di wilayah tersebut. Namun, upaya Turki untuk meningkatkan hubungannya dengan negara yang ada di wilayah Kaukasus Selatan khususnya Armenia gagal. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik Nagorno-Karabakh dan kemitraan Turki dan Azerbaijan dalam Perjanjian *Strategic Partnership and Mutual Support*. Penting untuk digarisbawahi bahwa persamaan penelitian karya Zeynab Vatankhah dengan penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Turki terhadap konflik Nagorno-Karabakh. Sebaliknya, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan karya Zeynab Vatankhah karena penelitian ini mengungkap faktor agen dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dalam melakukan kesepakatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam membangun Pusat Gabungan Turki-Rusia pasca konflik Nagorno-Karabakh.

Berdasarkan pemaparan dari perbandingan penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini memiliki *State of The Art*. *State of The Art* dalam penelitian ini terletak pada aspek agen yang berkaitan dengan kepribadian Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan aspek struktur yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki khususnya kesepakatan Turki kepada Rusia dalam membangun Pusat Gabungan Turki-Rusia di wilayah Ağdam, Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini

ingin mengungkap dan menjelaskan determinan yang mempengaruhi Turki dalam melakukan kesepakatan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah bahwa Turki sebagai pihak ketiga yang terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh melakukan kesepakatan kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia di Kota Ağdam, Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

“Mengapa Turki melakukan kesepakatan kepada Rusia dalam membangun Pusat Gabungan Turki-Rusia di Kota Ağdam, Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh (2020) ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Turki terhadap konflik Nagorno-Karabakh.
2. Untuk menjelaskan determinan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki khususnya kesepakatan Turki kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia di wilayah Ağdam, Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

1. Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah kepada Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro terkait kebijakan luar negeri Turki.
2. Untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya tentang kesepakatan Turki kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia di wilayah Ağdam, Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh (2020).
3. Untuk menambah referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pembahasan kebijakan luar negeri Turki dalam isu konflik Nagorno-Karabakh.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Memberikan wawasan pengetahuan dan urgensi tentang kebijakan luar negeri Turki khususnya kesepakatan Turki kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia di wilayah Ağdam, Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh (2020).

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Teori Kebijakan Luar Negeri Walter Carlsnaes**

Alangkah baiknya dalam melakukan sebuah penelitian yang sifatnya ilmiah diperlukan sebuah teori atau konsep sebagai salah satu pondasi dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Teori dapat

diartikan sebagai sebuah penjelasan tentang pemberian makna terhadap segala fenomena yang terjadi, sehingga dapat digunakan dalam menjelaskan suatu fenomena tersebut (Mas'ood, 1996:218). Selain itu, teori juga berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam sebuah penelitian, sehingga diperlukan bukti-bukti yang logis guna menguji sebuah teori. Disisi lain, penelitian ini akan menjelaskan kebijakan luar negeri Turki perihal kesepakatan Turki kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia di wilayah Ağdam, Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020. Gagasan dari teori kebijakan luar negeri Walter Carlsnaes dirasa cocok untuk menjelaskan kesepakatan tersebut karena menjelaskan aspek agen dan struktur sebagai determinan pengambilan tindakan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dari Walter Carlsnaes.

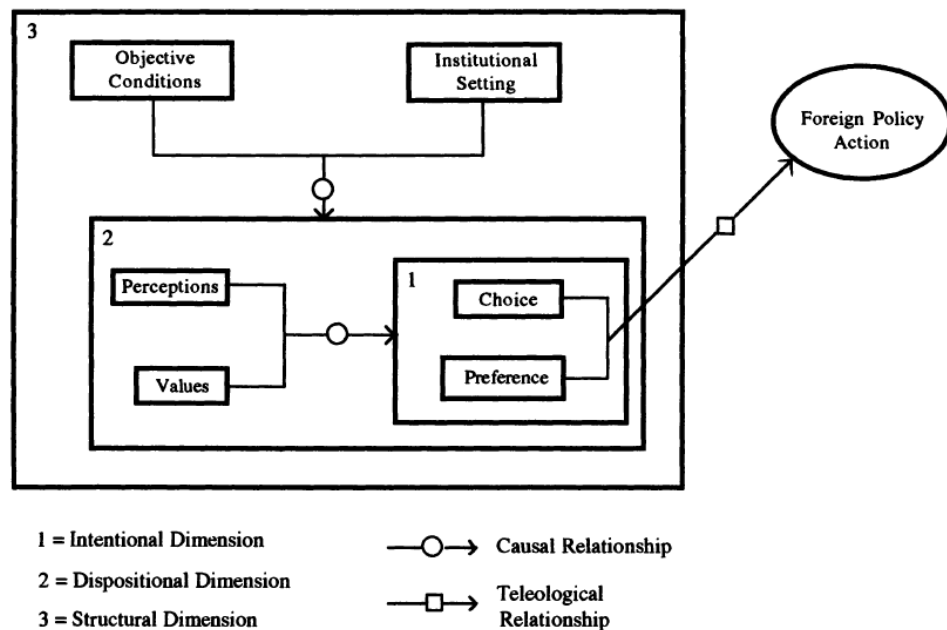
Teori kebijakan luar negeri Walter Carlsnaes tentang agen dan struktur bisa dilacak dalam karya ilmiahnya yang berjudul "The Agency-Structure Problem in Foreign Policy Analysis" (1992). Di dalam karyanya tersebut dijelaskan bahwa mayoritas para pengkaji kebijakan luar negeri lebih condong mengklasifikasikan aspek agen dan struktur secara berbeda dalam menghasilkan suatu kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, aspek agen dan struktur diklasifikasikan melalui empat pendekatan, yaitu pendekatan kolektifisme dan individualisme yang dibingkai dalam aspek ontologi, serta pendekatan objektifisme dan

interpretivisme yang dibingkai dalam aspek epistemologi (Carlsnaes, 1992:249). Pengklasifikasian ini mendorong Carlsnaes menyanggah pengelompokan agen dan struktur dalam empat pendekatan tersebut. Hal ini dikarenakan aspek agen bisa saja mengecualikan aspek struktur atau justru aspek struktur yang mengecualikan aspek agen dalam konteks analisis suatu kebijakan luar negeri (Carlsnaes, 1992:250). Pengelompokan aspek agen dan struktur dalam empat pendekatannya ini tentunya akan kurang dalam menguraikan tindakan kebijakan luar negeri suatu negara. Singkat kata, Carlsnaes memiliki pemikirannya sendiri dalam menganalisis pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

Di dalam teori kebijakan luar negeri Walter Carlsnaes terdapat beberapa asumsi dasar pemikiran. Pertama, tindakan kebijakan luar negeri pada aspek agen dan struktur tidak dapat dikecualikan atau memberikan hak istimewa pada aspek tertentu (Carlsnaes, 1992:246). Dengan kata lain, aspek agen dan struktur dalam kebijakan luar negeri bersifat positive sum-game, yaitu agen dan struktur secara fundamental saling berkaitan satu sama lain secara dinamis. Berikutnya, aspek agen dan struktur menjadi salah satu proses yang dinamis dari waktu ke waktu yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara (Carlsnaes, 1992:256). Adanya pengaruh ini dikarenakan tindakan kebijakan luar negeri berhubungan dengan niat dan faktor psikologis kognitif, serta fenomena struktural yang berkaitan dengan ciri masyarakat dan

lingkungannya. Dengan demikian, Carlsnaes memiliki model dinamis dalam menelaah sebuah tindakan kebijakan luar negeri suatu negara.

Walter Carlsnaes memiliki kerangka analitis sintetik dalam mengulas aspek agen dan struktur. Aspek agen dan struktur dapat mempengaruhi suatu negara dalam mengambil tindakan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, Carlsnaes memaparkannya dalam tiga dimensi yang disebut sebagai “a logically tripartite approach” (Carlsnaes, 1992:254). Tiga dimensi dalam *tripartite approach* atau pendekatan tripartite ini meliputi dimensi intensional, dimensi disposisional, dan dimensi struktural (Carlsnaes, 1992:254). Alhasil, ketiga dimensi tersebut nantinya akan menciptakan sebuah produk, yaitu kebijakan luar negeri suatu negara.



**Gambar 1.1 Penjelasan Tindakan Kebijakan Luar Negeri**  
 (Carlsnaes, 1992:254)

Merujuk pada gambar 1.1, ada tiga dimensi dari tindakan kebijakan luar negeri yang dipaparkan oleh Walter Carlsnaes, yaitu dimensi intensional, disposisional, dan struktural. Di mulai dari bagian pertama, yaitu dimensi intensional mencakup *choice* dan *preference*. Dimensi tersebut dipandang sebagai dasar dari maksud dan tujuan agen mengambil tindakan kebijakan luar negeri dan menguraikan alasan agen dalam memilih praktik kebijakan luar negeri (Carlsnaes, 1992:254). Dengan kata lain, dimensi ini berusaha untuk membantu memahami hubungan kausalitas dari sebuah tindakan kebijakan luar negeri. Melalui sifat ini nantinya mendorong agen dalam mengambil tindakan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada sebuah tujuan, yaitu “untuk” dan berdasarkan alasan, yaitu “karena”, sehingga pelaksanaan kebijakan luar negeri dapat ditetapkan (Carlsnaes, 1992:255). Oleh karena itu, dengan dimensi intensional ini agen akhirnya mengambil tindakan kebijakan luar negeri.

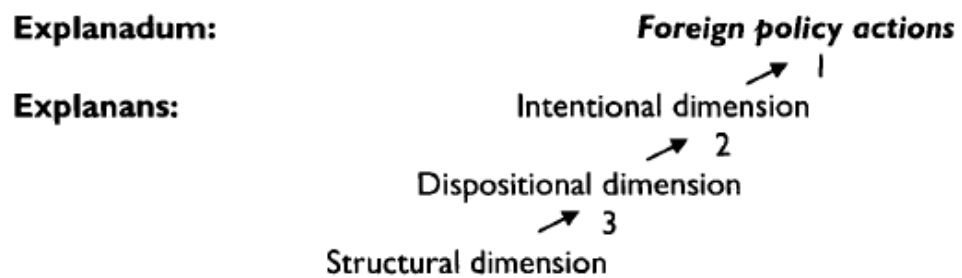
Berikutnya, ada dimensi disposisional yang terdiri dari *perceptions* dan *values* (termasuk norma). Dimensi ini erat kaitannya dengan pendekatan kognitif dan psikologis dari agen dalam menjelaskan praktik kebijakan luar negeri (Carlsnaes, 2016:126). Mekanisme dari *perceptions* dilihat sebagai pandangan agen terhadap dunia, sehingga agen memiliki sistem kepercayaannya terhadap dunia (Carlsnaes, 2016:126). Sebaliknya, mekanisme *values* dipandang sebagai sistem kepercayaan yang dianut oleh agen, sehingga agen

memiliki motivasi untuk mencapai tujuannya (Carlsnaes, 2016:126). Dimensi disposisional bisa dikatakan memiliki sifat yang lebih mendalam karena menitikberatkan pada aktor yang membuat kebijakan luar negeri. Singkat kata, dimensi ini mampu mempengaruhi dan mengarahkan agen dalam membuat suatu kebijakan luar negeri.

Terakhir, yaitu dimensi struktural yang memiliki unsur *objective conditions* dan *institutional setting*. Dimensi tersebut bisa membatasi tindakan agen dan menawarkan peluang bagi agen (Carlsnaes, 2016:126). Hal ini disebabkan karena dimensi tersebut mencakup aspek nasional, internasional, budaya, sosial, dan material (Carlsnaes, 2016:126). Dalam hal ini, agen harus memperhitungkan dengan baik aspek tersebut agar konsekuensi yang diterima bisa diminimalisir. Dimensi ini juga mendorong preferensi agen dalam mengambil tindakan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, dimensi struktural mendorong agen termotivasi dalam mengambil tindakan kebijakan luar negeri atas pertimbangan faktor eksternal yang telah dikalkulasi.

Lebih lanjut, Carslnaes memberikan alur uraian terkait analisis kebijakan luar negeri. Alur ini dikenal sebagai kerangka berpikir bagaimana suatu negara menghasilkan kebijakan luar negeri. Hasil dari kebijakan luar negeri suatu negara dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini.





**Gambar 1.2 Penjelasan Tiga Dimensi dalam Kebijakan Luar Negeri (Carlsnaes, 2007:131)**

Merujuk pada gambar 1.2, terdapat bagian *explanans* dan *explanandum*. Dalam hal ini, bagian *explanans* merupakan variabel independen (penjelas). Bagian tersebut terdiri dari dimensi intensional, dimensi disposisional, dan dimensi struktural. Penjelasan tentang ketiga dimensi ini dimulai dari dimensi struktural yang nantinya memberikan pengaruh pada dimensi disposisional dan dimensi intensional. Dengan begitu, setiap dimensi tersebut memiliki hubungan kausalitas satu sama lain. Berikutnya, ada bagian *explanandum* yang bersifat variabel dependen (akibat). Bagian ini mencakup tindakan kebijakan luar negeri suatu negara. Alhasil, tindakan kebijakan luar negeri suatu negara akan diputuskan ketika dimensi struktural, disposisional, dan intensional sudah terpenuhi.

## 1.6 Operasionalisasi Konsep

### 1.6.1 Definisi Konsep

1. Kebijakan Luar Negeri

Walter Carlsnaes memberi penjelasan terhadap pengertian kebijakan luar negeri sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berdaulat dalam bentuk komitmen, tujuan, dan arah yang secara eksplisit berguna untuk menanggapi suatu kondisi, tujuan, dan pelaku (pemerintah atau non-pemerintah) yang ingin dipengaruhi diluar legitimasi atau diluar dari teritorial mereka (Carlsnaes et al., 2002:437).

## 2. Konflik

Menurut *Uppsala Conflict Data Program* (UCPD) bahwa konflik antar negara dapat diartikan sebagai konflik yang melibatkan antara dua atau lebih negara/pemerintah (Uppsala University, n.d.).

## 3. *Memorandum of Understanding* (MoU)

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *Memorandum of Understanding* (MoU) didefinisikan sebagai pernyataan tertulis yang mengandung pemahaman para pihak untuk membuat kontrak atau sebuah perjanjian lainnya (Garner, 2009:988).

### **1.6.2 Definisi Operasional**

#### 1. Kebijakan Luar Negeri

Penelitian ini memfokuskan kebijakan luar negeri Turki khususnya kesepakatan Turki kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia pasca konflik Nagorno-Karabakh. Dalam hal ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan melakukan kesepakatan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mendirikan Pusat

Gabungan Turki-Rusia pasca konflik Nagorno-Karabakh pada 10 November 2020 (Presidency of The Republic of Turkiye, 2020b). Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait pembentukan Pusat Gabungan Turki-Rusia oleh Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melalui konferensi video pada 11 November 2020 (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2020a). Pusat Gabungan Turki-Rusia digunakan untuk mengawasi perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia pada 9 November 2020 (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2020b). Dengan demikian, adanya kesepakatan yang dibuat oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan penandatanganan MoU oleh Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar terkait Pusat Gabungan Turki-Rusia dapat dilihat sebagai bentuk dari kebijakan luar negeri yang diambil oleh Turki dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh.

## 2. Konflik

Isu yang diangkat di dalam penelitian ini berkaitan dengan konflik Nagorno-Karabakh. Pada 27 September 2020, Konflik Nagorno-Karabakh kembali pecah. Konflik ini melibatkan Armenia dan Azerbaijan. Konflik Nagorno-Karabakh pecah karena pihak Armenia menuduh bahwa pasukan militer Azerbaijan menyerang militer Armenia di Kota Vardenis-Armenia, sebaliknya Kementerian

Pertahanan Azerbaijan menuding bahwa pasukan militer Armenia menyerang terlebih dahulu di Kota Dashkasan-Azerbaijan (Lisbet, 2020:7). Imbas dari saling tuduh-menuduh ini Armenia dan Azerbaijan melakukan pertempuran dengan menggunakan seluruh kekuatan militernya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, konflik Nagorno-Karabakh berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia pada 9 November 2020 (President of Russia, 2020b). Akhir dari konflik Nagorno-Karabakh dan perjanjian ini tampaknya dimenangkan oleh Azerbaijan. Hal ini dikarenakan Azerbaijan berhasil menduduki dan mendapatkan kembali tujuh distrik wilayah Azerbaijan yang sebelumnya diduduki oleh Armenia. Tujuh distrik yang dimaksud ialah wilayah Ağdam, Fuzuli, Gubadli, Jabrail, Kalbajar, Lachin, dan Zangilan (Askerov, 2020:56). Oleh karena itu, konflik Nagorno-Karabakh yang melibatkan Armenia dan Azerbaijan adalah konflik antar negara.

### 3. *Memorandum of Understanding* (MoU)

*Memorandum of Understanding* (MoU) yang dimaksud di dalam penelitian ini berkaitan dengan Pusat Gabungan Turki-Rusia. Pada 11 November 2020, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melalui konferensi video menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) guna membangun Pusat Gabungan Turki-Rusia di Azerbaijan (Republic of

Türkiye Ministry of National Defence, 2020a). Pusat Gabungan Turki-Rusia diresmikan oleh Menteri Pertahanan Azerbaijan Zakir Hasanov, Wakil Menteri Pertahanan Turki Yunus Emre Karaosmanoğlu, dan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin pada 30 Januari 2021 (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2021a). Singkat kata, Pusat Gabungan Turki-Rusia memiliki legitimasi melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang disepakati oleh Turki dan Rusia.

### **1.7 Hipotesis Penelitian**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab Turki melakukan kesepakatan kepada Rusia untuk mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia di wilayah Ağdam, Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh dipengaruhi oleh dimensi intensional, dimensi disposisional, dan dimensi struktural.

1. Dimensi intensional dari aspek *choice* dan *preference* Presiden Erdoğan yang ingin berpartisipasi dalam proses perdamaian antara Azerbaijan dan Armenia.
2. Dimensi disposisional berupa *perceptions* dan *values* Presiden Erdoğan yang ingin menancapkan pengaruh bagi Azerbaijan sekaligus menjadi kekuatan regional di wilayah Kaukasus Selatan.
3. Dimensi struktural yang terdiri dari *objective conditions* dan *institutional setting*, yaitu bahwa Turki bergantung pada ekonomi dan militer Rusia, serta institusi OSCE Minsk Group yang tidak efektif dalam memberikan

solusi perdamaian bagi Armenia dan Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh.

## **1.8 Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif menjadi pedoman dalam melakukan penelitian ini. Meminjam pengertian dari Lichtman (2006) bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mengetahui suatu fenomena dengan cara mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi dari kata-kata atau gambar (Lichtman, 2006:22). Lebih dari itu, untuk mengetahui suatu fenomena tersebut biasanya juga melibatkan wawancara dan pengamatan manusia di lapangan (Lichtman, 2006:22). Alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena argumen, data, dan informasi yang nantinya disajikan dapat dianalisis lebih mendalam dan kompleks. Selain itu, penelitian ini bisa dinarasikan dengan baik melalui elaborasi dan deskripsi terkait argumen, data, dan informasi yang diolah. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menyajikan pemahaman dan mengungkap secara objektif data-data dan fakta yang ada tentang kebijakan luar negeri Turki khususnya kesepakatan Turki kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia di wilayah Ağdam, Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh (2020).

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Dalam penjelasannya, penelitian eksplanatif bisa dipahami sebagai penelitian yang berusaha untuk menelaah variabel-variabel yang diteliti dan

menjelaskan hubungan satu sama lain antara variabel-variabel yang saling berkaitan atau berasosiasi (Creswell, 2012:340). Secara spesifik, penelitian ini akan menggunakan variabel-variabel yang mengacu pada teori kebijakan luar negeri Walter Carlsnaes. Variabel yang dimaksud di dalam teori ini adalah dimensi intensional (*choice* dan *preference*), dimensi disposisional (*perceptions* dan *values*), dan dimensi struktural (*objective conditions* dan *institutional settings*). Variabel yang ada di teori ini akan dianalisis untuk menemukan adanya hubungan keterkaitan antar variabel yang menyebabkan Turki melakukan kesepakatan kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia di wilayah Ağdam, Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh (2020).

### **1.8.2 Jenis Data**

Ada dua jenis data yang digunakan dalam menyelenggarakan penelitian ini. Pertama, penelitian ini menggunakan data primer. Data primer dapat dipahami sebagai data yang diterima dari tangan pertama secara langsung, baik lisan atau tulisan dari subyek penelitian (Lune & Berg, 2017:161). Melalui data primer ini informasi yang didapatkan lebih spesifik dan mendukung poin penelitian (Salkind, 2012:52). Kedua, data sekunder juga akan diterapkan di dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diterima dari tangan kedua secara tidak langsung, baik lisan atau tulisan dari kepustakaan (Lune & Berg, 2017:161). Melalui data sekunder ini peneliti mencari penelitian ilmiah sebelumnya untuk dijadikan sumber referensi (Salkind, 2012:50). Alhasil, jenis data

primer dan sekunder dapat memperkaya data-data yang ada di dalam penelitian ini.

### **1.8.3 Sumber Data**

Sumber data primer dan sekunder menjadi basis dari penelitian ini. Pada bagian sumber data primer, penelitian ini akan mengambil data-data dari hasil wawancara penelitian skripsi bersama Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I. M.A. Ph.D. Lebih lanjut, sumber data sekunder yang diperoleh nantinya juga berasal dari buku, jurnal, laporan, dan media berita, serta sumber sekunder lain yang relevan dengan penelitian ini. Alhasil, sumber data primer dan sekunder yang telah dipilih akan dianalisis lebih mendalam dan disajikan dalam bentuk narasi yang mudah dipahami.

### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu studi kepustakaan (*desk research*) dan wawancara. Pertama, studi kepustakaan (*desk research*) menjadi landasan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Studi kepustakaan (*desk research*) ialah suatu metode pengumpulan data dengan mengambil sejumlah data dan informasi melalui bantuan-bantuan material yang berada di perpustakaan (Lexy J, 2017:82). Penelitian ini akan memanfaatkan semua akses mulai dari kepustakaan, arsip, dan internet. Lebih dari itu, penelitian ini bisa secara leluasa dapat menggali data sekunder yang tersedia. Melalui data sekunder yang tersedia, maka



penelitian ini bisa menggunakan literatur dan data-data yang kredibel. Dengan demikian, melalui teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*desk research*), maka penelitian ini bisa membandingkan dan menelaah segala sumber kepustakaan yang tersedia.

Kedua, teknik pengumpulan data berupa wawancara juga diaplikasikan dalam melakukan penelitian ini. Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan (Moleong, 2010:186). Secara spesifik, narasumber yang akan disoroti di dalam penelitian ini adalah Dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global dari Universitas Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I. M.A. Ph.D. Diharapkan dosen tersebut bisa memberikan informasi dan data terkait kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pernyataan dari hasil wawancara penelitian skripsi bersama Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I. M.A. Ph.D bisa menjadi sumber data primer dan dapat mendukung poin penelitian ini.

### **1.8.5 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Pertama, analisis data kualitatif dapat dipahami sebagai salah satu proses untuk menyeleksi dan menafsirkan data secara terstruktur yang didapatkan dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan sumber-sumber lainnya, sehingga data tersebut dapat mudah dimengerti dan

hasilnya bisa diberitahukan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, 2007:159). Dengan demikian, analisis data berguna untuk menganalisis data-data yang telah didapatkan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data metode kongruen. Menurut Mills dan kawan-kawan memaparkan bahwa metode kongruen mengacu pada peneliti yang merumuskan atau memproduksi teori yang kemudian memprediksi hasil dari suatu keadaan dalam kasus tertentu (Mills et al., 2010:62-63). Jika hasil dari kasus tersebut konsisten dengan teori, maka ada kemungkinan hubungan sebab-akibat antara keadaan dan fenomena sosial (Mills et al., 2010:63). Dengan kata lain, metode kongruen bertujuan untuk mencocokkan antara variabel independen yang ada di teori dengan data empiris yang ada. Berkaitan dengan analisis data metode kongruen, penelitian ini akan menggunakan variabel independen dari dimensi intensional, dimensi disposisional, dan dimensi struktural yang berasal dari teori kebijakan luar negeri Walter Carlsnaes dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Turki khususnya kesepakatan Turki kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia di wilayah Ağdam, Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh (2020). Singkat kata, adanya penerapan teori tersebut digunakan untuk menyeleksi dan menganalisis data-data yang ada.

Kedua, interpretasi data kualitatif dapat diartikan sebagai pengembangan ide tentang temuan yang ada telah dihubungkan dengan literatur berdasarkan konsep atau teori (Bogdan & Biklen, 2007:159).

Hasil pengembangan ide berupa analisis dari penerapan Teori Kebijakan Luar Negeri Walter Carlsnaes akan disajikan dalam penelitian ini. Analisis yang mendukung penerapan teori akan menjadi suatu pandangan dan temuan yang teoritis di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, interpretasi data berguna untuk menyajikan data-data yang telah dianalisis.

#### **1.8.6 Kualitas Data (*goodness criteria*)**

Penelitian ini memiliki kualitas data yang baik karena ditunjang dari data primer dan sekunder. Kualitas data primer akan diperoleh dari sisi pemerintah Turki dan Rusia, baik berupa *press release*, laporan resmi, dan pernyataan langsung dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Lebih dari itu, hasil wawancara bersama Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global dari Universitas Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I. M.A. Ph.D akan dijadikan sebagai sumber data primer di dalam penelitian ini. Dalam rangka memperkokoh kualitas data dalam penelitian ini, maka penelitian ini juga ditunjang dari data sekunder. Data sekunder akan diperoleh dari penelitian ilmiah sebelumnya, buku, laporan resmi dan media berita terpercaya. Alhasil, penelitian ini memiliki kualitas data yang empiris dan teoritis guna mengungkap dan menjelaskan determinan dari kesepakatan Turki kepada Rusia dalam membangun Pusat Gabungan Turki-Rusia pasca konflik Nagorno-Karabakh (2020).

## **1.9 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang dibagi dan disusun atas empat bab, yaitu:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab I memuat pendahuluan yang menjadi desain riset dari penelitian ini.

### **Bab II Kebijakan Luar Negeri terhadap Konflik Nagorno-Karabakh**

Bab II memuat deskripsi kebijakan luar negeri Turki terhadap konflik Nagorno-Karabakh.

### **Bab III Analisis Kesepakatan Turki kepada Rusia dalam Mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia Pasca Konflik Nagorno-Karabakh**

Bab III memuat analisis kesepakatan Turki kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia pasca konflik Nagorno-Karabakh.

### **Bab IV Kesimpulan**

Bab IV memuat penutup dengan subab berupa kesimpulan dan saran-saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

## **1.10 Pertanyaan Wawancara Penelitian**

1. Apa *values* (nilai-nilai) yang menjadi sistem kepercayaan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan ?
2. Apa *perceptions* (persepsi) Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dalam melihat dunia internasional ?

3. Apakah *perceptions* (persepsi) dan *values* (nilai-nilai) yang diadopsi mendorong Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan ingin menjadikan Turki sebagai kekuatan regional atau bahkan global ?
4. Apakah doktrin *Strategic Depth* yang digagas oleh Ahmet Davutoğlu masih diaplikasikan dalam memandu kebijakan luar negeri Turki ?